

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu negara terdiri dalam berbagai macam bidang. Pembangunan dapat terjadi bila pemerintahan suatu negara mempunyai pendapatan yang memadai. Pendapatan suatu negara bisa bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, bisa juga dari sektor swasta dan pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi negara adalah pajak. Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib bagi rakyatnya, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi.

Semenjak era reformasi, pemerintahan dituntut untuk memberlakukan otonomi daerah, yang secara resmi berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan yang akan digunakan untuk belanja pemerintah daerah mereka sendiri. Dasar hukum untuk melaksanakan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan terakhir diubah menjadi Undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber yang menentukan bahwa suatu daerah mandiri. Karena semakin besar pendapatan asli daerahnya semakin rendah tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusatnya, begitu pula sebaliknya bila semakin kecil pendapatan suatu daerah maka besar ketergantungannya semakin tinggi pada pemerintah pusat.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan wisatanya. Salah satu wisata yang terkenal di Jawa Barat adalah wisata kuliner dan wisata objek hiburan. Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perintis perkembangan tersebut. Hal ini dikarenakan perkembangan kota Bandung semakin pesat, hal itu bisa dilihat dari bermunculan banyaknya mall atau pusat perbelanjaan besar, restoran, dan cafe di lokasi strategis di kota Bandung seperti di daerah Dago, Riau dll. Selain perkembangan tersebut, dengan dibangunnya fasilitas tol Cipularang memudahkan akses orang luar Bandung terutama orang Jakarta untuk datang ke Bandung. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke kota Bandung akan membuat pendapatan asli daerah Bandung menjadi naik terutama dalam bidang restoran dan hiburannya.

Kota Cimahi yang semenjak tahun 2001 ditetapkan sebagai otonom dari statusnya terdahulu sebagai kota administratif juga menjadi salah satu objek wisata bagi wisatawan karena letaknya yang dekat dengan kota Bandung. Dengan perkembangan kota Bandung yang pesat di wisata kuliner dan objek wisata hiburan, kota Cimahi pun semakin berkembang. Salah satu perkembangan tersebut dapat dilihat dari adanya pertumbuhan wisata kuliner dan objek wisata hiburan yang ada di Cimahi. Objek wisata kuliner di Cimahi yang sedang berkembang adalah di kawasan Kolonel Matsuri, Cihanjuang, dll. Ojek wisata hiburan yang ada di Cimahi adalah pusat perbelanjaan Cimahi Mall, Alam Wisata Cimahi, Curug Cimahi dll.

Banyaknya pertumbuhan pusat perbelanjaan atau mall dan perkembangan wisata kuliner yang ada di Bandung dan Cimahi menyebabkan penghasilan daerah berupa pajak restoran dan pajak hiburan pun akan semakin meningkat. Peningkatan sumber-sumber pajak tersebut turut andil dalam meningkatkan penghasilan asli

daerah. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut tentang seberapa besar perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli kota Bandung dan Cimahi, serta seberapa besar pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan di kota Bandung dan Cimahi.

Peneitian terdahulu yang menjadi penunjang untuk penulis adalah Edward W. Memah (2012) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado menyatakan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Christhian Rame dan I Gusti Putu Nata Wirawan (2011) dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung menunjukkan rata-rata 121,84 % maka tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektif. Tahun 2001-2010 menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi penerimaan pajak hiburan menunjukkan sebesar 5,88 % dan dapat dikategorikan sangat efisien. Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung.

Vira Hardiyanti (2013) dengan judul Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya menyatakan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kurang, efektifitas kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di kota Surabaya sudah termasuk efektif.

Dengan latar belakang yang udah diuraikan di atas, penulis bermaksud menunagkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survey pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan Kota Bandung?.
2. Seberapa besar efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan Kota Cimahi?.
3. Seberapa besar pengaruh dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung?.
4. Seberapa besar pengaruh dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Cimahi?.
5. Bagaimanakah perbandingan kontribusi dan pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan antara kota Bandung dan kota Cimahi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguraikan seberapa besar efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan Kota Bandung.
2. Menguraikan seberapa besar efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan Kota Cimahi.

3. Menguraikan seberapa besar pengaruh dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.
4. Menguraikan seberapa besar pengaruh dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Cimahi.
5. Menguraikan perbandingan kontribusi dan pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan antara kota Bandung dan kota Cimahi

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis harapan penelitian ini dapat berguna bagi:

1. Akademis

Bagi bidang akademis, penulis berharap para akademisi dapat lebih mengembangkan pengetahuan mengenai perpajakan daerah. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat menjadi referensi untuk menulis skripsi, makalah atau jurnal.

2. Pemerintahan

Bagi pemerintahan, khususnya pemerintahan kota Bandung, dan Cimahi, penulis berharap dapat memperhatikan dan memberi perhatian bagi sumber-sumber pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandung dan kota Cimahi.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat, penulis berharap menambah pengetahuan tentang pajak terlebih lagi pajak daerah yang hubungannya erat dengan pembangunan daerah. Penulis berharap, masyarakat juga turut sadar dalam membayar pajak daerah

bahwa dengan membayar pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya.